

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH. STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

Clara Margilia Reinamah

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

*E-mail: reinamahclara@gmail.com

Abstract

The purposes of this study are: 1) The Effect of Participation in Budgeting to the Performance of Local Government personnel in Manggarai Regency; 2) The Effect of Organizational Commitment to the Performance of Local Government personnel in Manggarai Regency; 3) The Effect of Participation in Budgeting and Organizational Commitment to the Performance of Local Government personnel in Manggarai Regency. The type of this research is causative research. The type of data used in this study are quantitative and qualitative data. While the data sources used are primary and secondary. The variables used in this study are the dependent variable and the independent variable. Data collection techniques were carried out by documenting and distributing questionnaires to structural officials and several staff who were directly related and also participated in the budgeting process at the Office of the Regional Finance and Assets Agency of Manggarai Regency. The analytical method used is Multiple Linear Regression. The results of the study prove that 1) Participation in budgeting has no significant effect on the performance of local government officials. 2) Organizational commitment has a significant effect on the performance of local government officials. 3) budgetary participation and organizational commitment have a significant effect on the performance of local government officials.

Keywords: *Participation in Budgeting, Organizational Commitment, Performance of Local Government Officials.*

PENDAHULUAN

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam suatu periode.

Proses perencanaan pembangunan daerah perlu diimbangi oleh ketersediaan beberapa hal seperti: kapasitas aparatur

pemerintah, sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana. Berkaitan dengan hal itu maka untuk mengukur tingkat pencapaian atas rencana yang ditetapkan dengan sasaran yang ingin dicapai perlu dilakukan evaluasi atas kinerja. Pemberlakuan UU No.9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah dan UU No.23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien.

Mardiasmo (2009) menjelaskan penganggaran dalam sektor publik merupakan suatu proses politik. Dalam hal ini anggaran merupakan instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang

publik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa anggaran publik menggambarkan kondisi keuangan organisasi publik yang meliputi informasi anggaran belanja, pendapatan dan aktivitas yang dilakukan.

Proses penganggaran daerah diatur dalam Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006. Regulasi tersebut menjelaskan tentang pedoman dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK memuat standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran menciptakan kesempatan pada bawahan untuk terlibat dalam mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Dalam peningkatan komitmen terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan dan mendapat target anggaran yang telah disepakati bersama.

Partisipasi penyusunan anggaran dinilai dapat meningkatkan kinerja aparat. Selain partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi juga memiliki peran penting terhadap pekerjaan untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif sehingga organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi. Aparat pemerintah yang ikut dalam penyusunan anggaran akan lebih bertanggung jawab jika didukung dengan komitmen aparat terhadap organisasi (instansi) yang mereka tempati saat ini.

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks pemerintah daerah, aparat yang ikut dalam penyusunan anggaran akan lebih bertanggung jawab jika didukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi (instansi) pemerintah daerah. Aparat akan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong aparat untuk menyusun anggaran dengan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi dan akan meningkatkan kinerja. Namun pada kenyataannya masih ada aparat yang melanggar peraturan yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Dimana masih ditemukan adanya pegawai yang terlambat datang kantor, bolos pada jam kerja, saling melempar tanggung jawab antar sesama

aparat, kemudian kurangnya ambil bagian dalam penyusunan anggaran sehingga tidak optimalnya sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi/instansi dan juga menurunnya kinerja dari masing-masing pegawai.

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah .

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah komitmen organisasi, budaya organisasi, akuntabilitas, kepuasan kerja dan kepemimpinan. Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Tinggi rendahnya komitmen pegawai terhadap organisasi tempat mereka bekerja sangat menentukan untuk pencapaian dalam organisasi.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah merupakan masalah yang banyak diperdebatkan, bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Penelitian judul ini telah beberapa kali dilakukan (Anwar et al, 2014; Arianti, 2018; Duvamindar, 2015; Juanaini, 2019; Kristiastanti, 2018; Wulandari, 2013; Yani, 2017) namun masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nivo Wulandari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian yang sekarang ini mengambil subjek pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah. Alasan peneliti mengambil subjek penelitian ini karena penyusunan anggaran telah menggunakan pendekatan partisipasi.

Penyusunan anggaran pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai telah menggunakan pendekatan partisipatif anggaran. Adapun kendala yang terjadi dalam penganggaran pada kantor Badan

Keuangan dan Aset Daerah kabupaten manggarai disebabkan karena adanya perubahan aplikasi saat ini yaitu dari SIMDA ke SIPD yang dapat menghambat proses penganggaran sehingga dapat menyebabkan kinerja dari setiap pegawai. Kemudian kurangnya partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran karena kurangnya sumber daya manusia yang berbeda-beda

menyebabkan terlambatnya proses pelaporan terkait dengan penganggaran sehingga dapat mempengaruhi tingkat pencapaian dan strategi yang telah ditetapkan.

Lalu dilihat dari serapan anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 2016-2020 yang belum memuaskan dan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel LRA di bawah ini:

Tabel 1 Data LRA Pemerintah Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Tahun	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
1	Pendapatan/	2016	1,158,175,203,603.00	1,068,340,708,429.00
	Belanja		1,212,794,494,445.85	1,114,586,408,405.00
2	Pendapatan/	2017	1,122,930,376,200.00	1,111,538,011,520.66
	Belanja		1,123,250,081,627.00	1,057,288,789,495.00
3	Pendapatan/	2018	1,110,912,310,087.00	1,097,948,217,140.78
	Belanja /		1,140,224,665,490.00	1,097,554,789,168.00
4	Pendapatan/	2019	1,224,940,604,266.00	1,129,400,675,074.51
	Belanja		1,244,413,520,445.00	1,187,342,937,347.00
5	Pendapatan/	2020	1,155,833,791,014.00	1,156,337,467,137.08
	Belanja		1,204,202,823,841.00	1,141,487,429,304.13

Berdasarkan data LRA tabel 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mampu direalisasikan Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 2016-2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai kurang optimal dalam berupaya untuk merealisasikan target APBD. Meskipun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020 untuk pendapatannya namun tetap saja belanja pada tahun 2020 tersebut belum juga mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian menunjukkan bahwa perlu adanya kerjasama aparat dalam instansi dan juga partisipasi dalam upaya penyusunan anggaran sehingga bisa mencapai tujuan atau pun strategi yang sudah ditentukan. Maka dalam hal ini kita dapat melihat bahwa kurangnya upaya dari pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja pada setiap pegawainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan judul dan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menjelaskan pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa elemen-elemen dalam pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner. Contohnya berupa kuesioner yang berisi data mengenai pernyataan tentang partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi dan kinerja yang nantinya akan disebar kepada para aparat pemerintah daerah di Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari responden yang bersumber dari jawaban responden atas pernyataan yang berhubungan dengan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber lain yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini berupa data LRA Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2016). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau catatan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas peneliti. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen atau catatan keuangan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten manggarai yang berjumlah 42 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan, tenaga dan waktu (Sugiyono, 2016). Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah jabatan struktural dan staf yang terlibat langsung dan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Berdasarkan kriteria tersebut diatas sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Teknik analisis merupakan teknik yang digunakan untuk menguji data yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima melalui kuesioner. Berikut ini penjelasan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi Linear Berganda. Penulis mengemukakan rumus analisis regresi linear berganda dilihat pada persamaan ini:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y= Kinerja Aparatur Pemerintah (nilai yang diprediksikan)

a = Konstanta (nilai Y apabila $X_1, X_2 \dots X_n = 0$)

β_1 = Koefisien dari Partisipasi Penyusunan Anggaran

β_2 = Koefisien dari Komitmen Organisasi

X_1 = Partisipasi Penyusunan Anggaran

X_2 = Komitmen Organisasi

e = standar eror.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
(Constant)	8.958	3.53		3.780	.003
Partisipasi Penyusunan Anggaran	.489	.153	.517	3.196	.003
Komitmen Organisasi	.491	.050	.880	9.789	.000

Data analisis regresi linear berganda seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.10 di atas, dapat dirumuskan suatu persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 8,958 + 0,489 X_1 + 0,491 X_2 + e$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 8,958 artinya jika partisipasi anggaran (X_1) dan komitmen organisasi (X_2) nilainya adalah 0, maka kinerja aparat pemerintah daerah nilainya adalah sebesar 8,958.

Nilai koefisien regresi variabel partisipasi anggaran (X_1) sebesar 0,489 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel X_1 mengalami kenaikan 1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,489. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel X_1 dan variabel Y, semakin naik X_1 maka semakin meningkat Y.

Koefisien regresi variabel komitmen organisasi (X_2) sebesar 0,491 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel X_2 mengalami kenaikan 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,491. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel X_2 dan variabel Y, semakin naik X_2 maka semakin meningkat Y.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen. Apabila nilai t hitung > t tabel maka pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah nyata. Untuk mengetahui hasil dari uji t yaitu dengan melihat signifikansi, apabila signifikansi t adalah lebih kecil dari 5% maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
(Constant)	8.958	3.53		3.780	.003
Partisipasi Penyusunan Anggaran	.489	.153	.517	3.196	.003
Komitmen Organisasi	.491	.050	.880	9.789	.000

Sesuai dengan tabel diatas yaitu hasil uji t atau secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran (X_1) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Y) adalah $0,003 < 0,05$ dan t hitung $3,196 > 1,701$ maka H_0 ditolak dan H_a 1 diterima, artinya terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah secara signifikan. Kemudian hasil uji t atau secara parsial nilai

signifikansi komitmen organisasi (X2) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan t hitung $9,789 > 1,701$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a2 diterima, artinya terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah secara signifikan.

Uji Statistik F

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Pengujian berdasarkan tabel anova (uji F), apabila f hitung $>$ f tabel maka terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4 hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	313.452	2	156.726	46.733	.000 ^b
Residual	90.548	27	3.354		
Total	404.00	29			

Berdasarkan hasil analisis uji F pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi partisipasi penyusunan anggaran (X1) dan komitmen organisasi (X2) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan f hitung $46,733 > 3,35$ f tabel. Hal tersebut membuktikan bahwa H_03 ditolak dan H_a3 diterima artinya terdapat pengaruh secara signifikan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Apabila nilai R^2 semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R^2 , maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen semakin terbatas. Berikut hasil Uji Koefisien Determinasi dari penelitian.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.881 ^a	.776	.759	1.83129

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan

bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,881 atau 88,1 % yang berarti bahwa korelasi antar variabel independen dengan variabel dependennya berpengaruh signifikan positif didasarkan pada nilai R yang berada di atas 0,5%. Nilai R square (R^2) atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum R^2 untuk data silang (*cossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamat, sedangkan untuk data runtun waktu (*timeseries*) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. Nilai sebesar 77,6 % mempunyai arti bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi mampu dijelaskan oleh variabel kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 77,6 % sedangkan sisanya 22,4 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil pengujian regresi dalam penelitian ini menunjukkan hipotesis 1 diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2013) bahwa adanya partisipasi penyusunan anggaran juga mendorong setiap aparat untuk meningkatkan prestasinya (Kinerja) dan bekerja lebih keras karena mereka menganggap bahwa target organisasi adalah merupakan target pribadinya. Hal inilah yang mendorong instansi pemerintah untuk terus berkembang dan meningkatkan partisipasi dalam penyusunan anggaran.

Keikutsertaan berbagai pihak, baik atasan maupun bawahan dalam penyusunan anggaran dapat mendorong moral kerja yang tinggi. Dimana para pegawai akan berusaha menciptakan anggaran yang sesuai dengan standar atau kondisi yang diinginkan dimasa depan sehingga kinerja suatu organisasi dapat

ditingkatkan. Moral kerja yang tinggi dapat mengarahkan seseorang kedalam perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi dan adanya suatu keyakinan dalam diri anggota organisasi bahwa pekerjaan merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Selain itu dengan tingginya partisipasi dalam penyusunan anggaran akan menghasilkan informasi yang efektif antara atasan dengan bawahan, sehingga komunikasi antara atasan dan bawahan dapat berjalan dengan lancar.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil pengujian regresi dalam penelitian ini menunjukkan hipotesis 2 diterima.

Hal ini menunjukkan hubungan antara komitmen organisasi searah dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi komitmen organisasi yang ada dalam setiap individu atau aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja yang baik pula. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Randal dalam Wulandari (2013) yang mengatakan bahwa komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula. Oleh karena itu peningkatan komitmen organisasi disetiap instansi pemerintah, merupakan prioritas dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Pegawai pemerintah yang berkomitmen akan bekerja semaksimal mungkin karena mereka menginginkan kesuksesan organisasi dimana mereka bekerja. Pegawai pemerintah yang berkomitmen akan memiliki pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi, perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan dan perasaan bahwa organisasi adalah tempat bekerjanya dan tinggalnya.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Hasil uji F menunjukan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil pengujian ini menunjukkan adanya

pengaruh signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil pengujian regresi dalam penelitian ini menunjukkan hipotesis 3 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran serta semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasinya, maka akan dapat meningkatkan kinerjanya dari pegawai itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran searah dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka kinerja aparat pemerintah daerah juga akan semakin tinggi pula.
2. Komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan hubungan antara komitmen organisasi searah dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Semakin tinggi komitmen organisasi yang ada dalam setiap individu atau aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja yang baik pula.
3. Partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran serta semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasinya, maka akan dapat meningkatkan kinerjanya dari pegawai itu sendiri.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan studi kasus pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya mengoptimalkan penerapan anggaran partisipatif bukan hanya partisipasi semu karena hal ini akan berdampak pada meningkatnya kinerja aparat serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap tugas pokok dan fungsi agar meningkatkan komitmen pegawai/aparat terhadap organisasinya.
2. Sebaiknya memberikan kesempatan kepada setiap aparat untuk melakukan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa melanggar peraturan dan ketetapan yang berlaku. Pegawai dengan inovasi yang tinggi akan memiliki implikasi terhadap peningkatan kinerja mereka.
3. Menambah jumlah sampel yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat serta menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung kepada objek atau metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner.
4. Menambah variabel independen, dependen, moderating, intervening yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Suhardi M dan Sumiati. (2014). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*. 1 (2).
- Arianti, Ririn. (2018). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderasi, (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Duvamindra, Ginanjar Yudha. (2015).

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jusnaini. (2019). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah di Kabupaten Gowa*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Kristiastanti, Eka. (2018). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Wulandari, Nivo. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Jurnal Artikel*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

Yani, Fitri. (2017). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.